

## **IPB Tuan Rumah Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

**<http://news.ipb.ac.id>**

Diposting oleh admin pada tanggal 13 September 2013

Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi salah satu tempat konsultasi publik dan jaring pendapat Komisi IV DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Senin (9/9). Kegiatan yang berlangsung di Kampus IPB Baranangsiang ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis IPB Prof Dr Hermanto Siregar.

“Kami senang IPB dipilih sebagai tempat konsultasi dan jaring pendapat ini. Merupakan apresiasi bagi kami. Mengapa? Karena Undang-undang No 27 ini kami pandang sebagai UU dengan substansi yang strategis. Dan kebetulan IPB merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri yang punya mandat dalam arti luas, termasuk perikanan dan kelautan. Teman-teman di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB, kompetensinya luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberi masukan atau pendapat dalam konsultasi publik dan jaring pendapat ini,” papar Prof Hermanto.

Lebih lanjut Prof Hermanto mengatakan, dilihat dari sejarahnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI baru ada setelah ‘disapah’ dari Kementerian Pertanian pada zaman Gus Dur. Sementara IPB sudah sejak lama menggeluti dunia kemaritiman ini.

Kegiatan yang diikuti sejumlah anggota Komisi IV DPR RI ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya pakar kelautan IPB Dr Fredinan Yulianda, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana, dan perwakilan dari World Wide Fund for Nature (WWF). Pimpinan Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam kata pengantarnya berharap Undang-undang ini bisa selesai sebelum pemilu legislatif dan presiden 2014 mendatang. (nm)